

EXECUTIVE SUMMARY

STUDI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DALAM ERA OTONOMI DAERAH

A. Pendahuluan

Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang NO: 22 Tahun 1999 diperbaharui melalui Undang-Undang No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah yang pelaksanaannya dimulai sejak tanggal 1 Januari 2000, memberikan harapan baru, antara lain mengenai: 1) semakin meningkatnya pelaksanaan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan; 2) terdapat keleluasaan dalam menghadapi persaingan global pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara professional. Dengan diperkuat Peraturan Pemerintah No: 25 dan 84 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, Pendidikan Non-Formal mendapat energi baru untuk memastikan kiprahnya dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat.

Salah satu dari bentuk pelayanan yang semakin dekat pada masyarakat sekaligus memberikan peluang yang lebih besar (akses) pendidikan untuk kelompok marginal yaitu melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). PKBM dapat menyediakan wadah kegiatan belajar bagi masyarakat setempat dengan cara mendorong masyarakat untuk menentukan sendiri jenis pendidikan yang mereka butuhkan sesuai dengan kondisi daerah.

Di sisi lain, pembinaan terhadap PKBM secara kelembagaan (aspek manajerialnya) menjadi tuntutan mendesak. Melalui upaya pembinaan ini, peranserta masyarakat luas diharapkan dapat mewujudkan kesinambungan PKBM agar dapat mandiri sejalan dengan lembaga pendidikan nonformal lainnya. Kesinambungan dan kemandirian PKBM tersebut diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal, peningkatan kecakapan hidup masyarakat, yang pada hakekatnya berkontribusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam kenyataan PKBM masih dihadapkan pada permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal, kurangnya motivasi warga belajar, keberadaan tutor belum berperan secara maksimal, kesulitan mencari lokasi PKBM yang memiliki sarana memadai, pelaksanaan program dan proses pembelajaran belum sesuai dengan tuntutan. Permasalahan eksternal, terlihat belum adanya suatu pola kerjasama yang simultan masyarakat. antara PKBM dengan dunia usaha (asosiasi), perbankan/BPR dan usaha kecil menengah setempat. Implikasinya adalah belum berjalannya kemitraan, kurikulum atau materi yang disampaikan kepada warga belajar sering berjangka pendek, temporer dan musiman. Kondisi program seperti ini, berdampak pada kesungguhan warga belajar dan para lulusannya dalam mengembangkan keterampilan, maupun meneruskannya dalam bentuk usaha keterampilan bermatapencaharian.

Otonomi daerah dalam bidang pendidikan sebagai perwujudan pelaksanaan azas desentralisasi dalam penyelenggaraan administrasi dan manajemen pendidikan, pada hakekatnya merupakan penerapan teori *division of power and authority* dari administrator puncak (pemerintah pusat) ke administrator pada tingkat di bawahnya (pemerintah daerah). Karena itu, penerapan desentralisasi tidak dipandang sebagai suatu sistem yang berdiri sendiri, dan bukan pula merupakan alternatif pengganti prinsip sentralisasi, tetapi keduanya merupakan sub-sub sistem dalam kerangka sistem yang lebih luas.

Sebagai jawaban atas kondisi tersebut, terus dikembangkan program-program pendidikan luar sekolah melalui PKBM, antara lain: 1) Pengembangan Anak Usia Dini; 2)

Keaksaraan Fungsional; 3) Paket A setara SD; 4) Paket B setara SLTP; 5) Kursus-kursus Keterampilan/Kejuruan; 6) Pemagangan; 7) Kejar Usaha; 8) Pendidikan Kewanitaan (Perempuan); 9) Pemberdayaan Ekonomi Desa; 10) Kursus Masuk Desa; 11) Kredit Mikro untuk usaha individu dan kelompok; 12) Rintisan Paket C setara SMU IPS. Prinsip yang diharapkan dari, oleh, untuk masyarakat.

Hasil kajian literatur dan studi dokumentasi mengenai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, diperoleh keterangan bahwa secara historis PKBM telah dirintis pada pertengahan tahun 1998. Pada awal tahun 1999 PKBM telah berjumlah 815 buah. Selanjutnya pada akhir Maret 2000 semakin berkembang jumlahnya menjadi 1.643 buah, bahkan pada tahun 2004 tercatat 3.064 buah, dimana hampir di setiap propinsi terdapat PKBM. Diagram berikut menggambarkan perkembangan PKBM di Indonesia:



Grafik 1
Perkembangan PKBM di Indonesia

Namun demikian sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, walaupun secara kuantitas perkembangan tersebut sangat menakjubkan dimana dalam kurun waktu hanya empat tahun terjadi penambahan jumlah PKBM mencapai ribuan, akan tetapi dilihat dari kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

B. Permasalahan

Arah baru dan perspektif masyarakat dalam bentuk tingginya partisipasi melalui PKBM, dihadapkan pada persoalan dilematis berkenaan dengan rendahnya kapabilitas dan kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan PKBM itu sendiri. Persoalan ini terungkap, dari hasil kajian beberapa data kasus PKBM yang kecenderungannya *belum merujuk pada pemenuhan standar minimal manajemen yang telah diluncurkan Depdiknas*. Salah satu contoh; program minimal yang harus dikelola oleh sebuah PKBM adalah tiga jenis satuan pendidikan nonformal, dari hasil kajian dokumen (daftar PKBM) di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat masih terdapat PKBM yang hanya menyelenggarakan satu atau dua satuan pendidikan non-formal.

Salah satu kajian yang relevan, hasil identifikasi yang dilaksanakan Yayasan Swadamas Jayagiri bekerjasama dengan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Jawa Barat dan UNESCO Jakarta pada tahun 2001 terhadap layanan pendidikan melalui Pusat-pusat Pemberdayaan Masyarakat (PPM) termasuk salah satunya PKBM di Propinsi Jawa Barat, diperoleh informasi bahwa permasalahannya berkisar pada pengelolaan dan pengendalian mutu kelembagaan. Hal tersebut terjadi karena masih *terbatasnya kemampuan dan pengetahuan manajerial pengelola*, penyelenggara program dan tenaga kependidikan, serta lemahnya partisipasi komponen terkait di luar lembaga, sehingga kurang optimalnya

mekanisme sistem penyelenggaraan pendidikan di mana PPM itu berada. Atas dasar itu perlu dikaji lebih mendalam *Penyelenggaraan PKBM dalam Otonomi Otonomi Daerah*

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah pokok di atas, maka tujuan studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi permasalahan internal yang ada di PKBM, terutama terkait dengan kesepuluh komponen PNF. Selain adanya permasalahan eksternal PKBM seperti pembinaan, jaringan kerjasama, dampak program pembelajaran bagi warga belajar dalam kaitannya dengan program kecakapan hidup dan peluang kerja bagi masyarakat setempat.
- b. Mengkaji pengelolaan pendidikan nonformal di PKBM guna memberdayakan masyarakat setempat agar dapat mandiri di masa mendatang.

D. Hasil yang Diharapkan

- a. Memberikan masukan agar PKBM di masa mendatang dapat mandiri, karena pembelajaran pada PKBM tidak seharusnya menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional (melalui dinas pendidikan di daerah) saja, tetapi juga pihak dunia usaha, perguruan tinggi dan stakeholders lainnya berdasarkan jalinan kerjasama.
- b. Menghasilkan dan merumuskan kebijakan bagi pengelolaan (manajemen) dan pembelajaran di PKBM agar dapat memberdayakan masyarakat lokal sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.

E. Kajian Pustaka

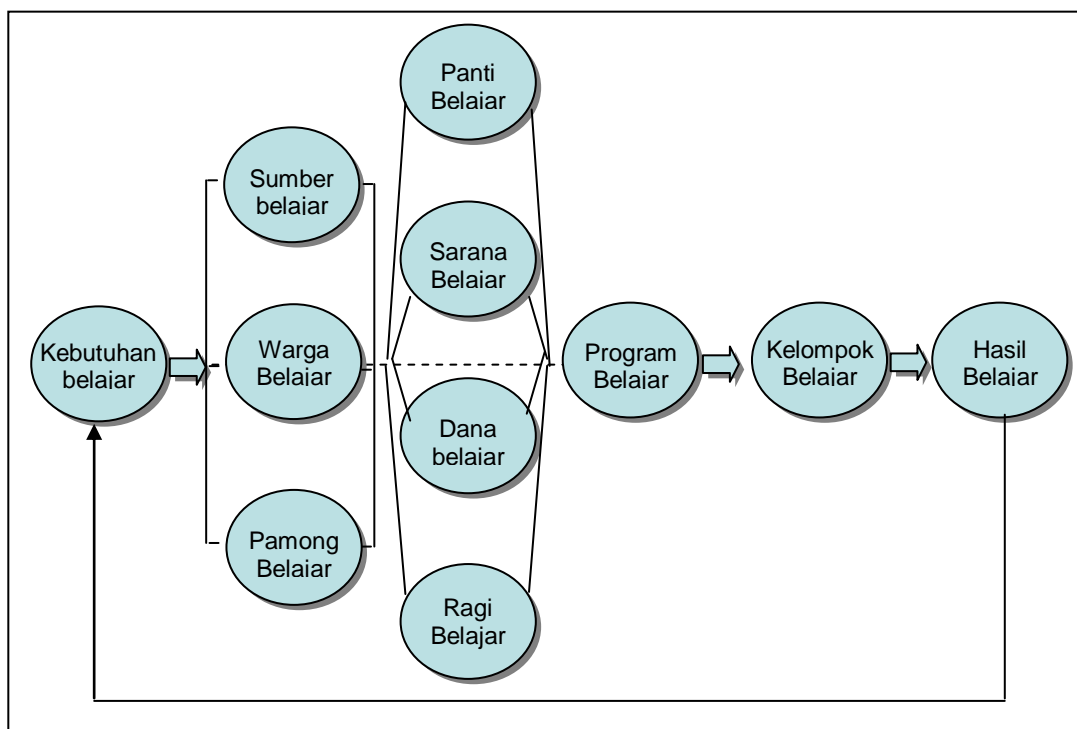
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (UNESCO menyebut dengan CLC atau *Community Learning Center*) adalah suatu wahana Nonformal yang didirikan dan dikelola oleh suatu komunitas tertentu/masyarakat setempat yang secara khusus berkonsentrasi dalam berbagai usaha pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat setempat yang termarginalkan, sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat tersebut.

Visi PKBM adalah terciptanya suatu komunitas/masyarakat setempat yang mandiri, lebih cerdas, lebih terampil, lebih produktif, lebih sejahtera, hidup bersama secara lebih harmonis serta selalu mengembangkan diri sebagai manusia seutuhnya ciptaan Tuhan.

Misi PKBM adalah mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran komunitas/masyarakat setempat secara dinamis dan memobilisasi berbagai sumberdaya dan potensi yang ada dalam rangka memfasilitasi terselenggaranya proses-proses pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat yang bermutu, terutama bagi komunitas/masyarakat setempat yang termarginalkan.

Manajemen PKBM, khususnya dalam masyarakat yang masih baru berkembang membutuhkan 3 komponen yang harus dikelola secara simultan dan seimbang untuk menghasilkan PKBM yang mandiri dan berkelanjutan, yaitu komponen manajemen pembelajaran, komponen manajemen usaha/karya, komponen manajemen pengembangan dan mobilisasi masyarakat.

Sebagai suatu sistem belajar PKBM dibangun atas lima komponen berikut: 1) kebutuhan belajar, 2) sumber belajar, 3) program pembelajaran, 4) kelompok belajar/wadah pembelajaran, dan 5) fasilitator kegiatan belajar.



Gambar 1
Hubungan Sistemik Komponen Program Pembelajaran di PKBM

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), merupakan pendekatan pendidikan (*educational approach*) terhadap masalah pendidikan luar sekolah yang didasarkan kepada konvergensi kebutuhan belajar (*learning needs*) dengan sumber belajar (*learning resources*) dalam masyarakat, sehingga membentuk suatu sistem belajar.

Mengingat karakteristik dan trend permasalahan pendidikan nonformal saat ini, konsepsi *Community Based Education (CBE)* menjadi salah satu sandaran dalam penguatan kerangka pikir penelitian ini, *Community Based Education* menekankan pentingnya pemahaman masyarakat, karakteristiknya, kebutuhannya, kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya. Disisi lain, CBE menekankan pula pada cara pemecahan masalah oleh masyarakat, dengan memanfaatkan potensi lingkungan (*to help people to help them self*).

Community Based Education, dikembangkan bersandar kepada beberapa konsepsi sebagai berikut:

1. Pendidikan sepanjang hayat,
2. Pendidikan kritis yang menekankan perbaikan kemampuan dasar masyarakat, meningkatkan kemampuan yang ada, serta partisipasi dalam setiap kegiatan,
3. Andragogi, dan
4. Learning organization.

Community Base Education (CBE) diarahkan pada pencapaian tujuan: 1) membantu pemerintah dalam memobilisasi sumber daya lokal dan meningkatkan peranan masyarakat untuk mengambil bagian yang lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pada semua tingkat, jenis dan jalur pendidikan; 2) merangsang terjadinya perubahan sikap dan persepsi tentang rasa kepemilikan masyarakat terhadap sekolah, rasa tanggung jawab, kemitraan, toleransi, dan kekuatan multikultural; 3) mendukung prakarsa pemerintah dalam meningkatkan dukungan masyarakat terhadap sekolah, khususnya orang tua dan masyarakat melalui kebijakan desentralisasi; 4) mendukung peranan masyarakat untuk mengembangkan inovasi

kelembagaan untuk melengkapi, meningkatkan, mengganti peran persekolahan dan meningkatkan mutu dan relevansi, penyediaan akses yang lebih besar, peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dasar untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 5) membantu mengatasi putus sekolah khususnya pada pendidikan dasar.

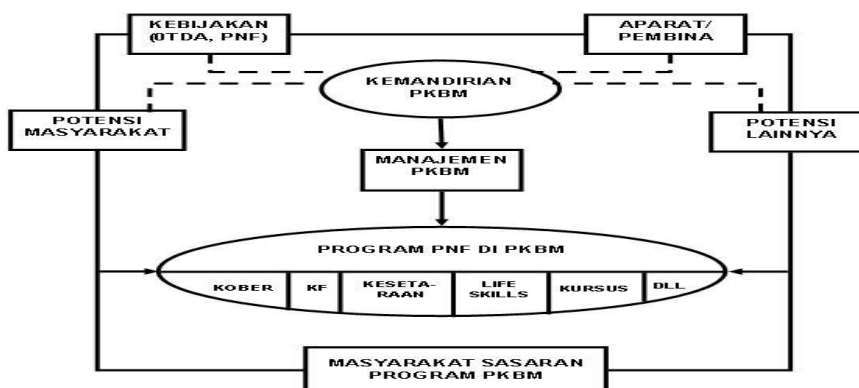
Karakteristik kurikulum Pendidikan Berbasis Masyarakat/*Community Based Education* (CBE), terutama dalam penyelenggaraan program-program pendidikan nonformal di PKBM adalah: 1) terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari, 2) permasalahan relevan dengan kebutuhan masyarakat, 3) urutan pembelajaran tergantung pada warga belajar, 4) waktu belajar fleksibel, 5) menggunakan konsep keterampilan fungsional, 6) menggunakan pendekatan andragogi, serta 7) tidak mementingkan ijazah.

Konsepsi lain yang perlu menjadi sandaran dan kerangka pikir studi ini, terutama berkenaan dengan peran pemerintah pada era otonomi. Konsepsi CBE menggambarkan kecenderungan terbukanya peluang bagi pemerintah untuk lepas dari tanggungjawabnya. Namun demikian, secara konseptual ditegaskan peran pemerintah dalam konteks CBE, yaitu: 1) sebagai pelayan masyarakat yang cepat tanggap, cepat memberi perhatian, tidak berbelit-belit dan masyarakat sebagai fokus pelayanan utama; 2) sebagai fasilitator, pemerintah dituntut berperilaku ramah, menyatu dengan masyarakat, menangkap aspirasi, membuka jalan, membantu/menemukan/membuka peluang, memberi dukungan, meringankan beban pekerjaan masyarakat, menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa membebani masyarakat; 3) sebagai pendamping, pemerintah merupakan teman, sahabat, mitra setia dalam diskusi untuk membantu dalam merencanakan program; 4) sebagai mitra, pemerintah berperan dalam pengambilan keputusan dengan mendudukkan posisi yang sejajar/horizontal/ setara dalam satu jalur yang sama. Tidak ingin menang, jalan, tampil, tenar/populer/diakui sendiri. Saling memberi, mengisi, mendukung dan tidak bersebrangan dengan masyarakat. Tidak banyak campur tangan, yang akan menyusahkan bahkan dapat mematikan kretaitas masyarakat; 5) sebagai penyandang dana. Mengingat lemahnya kemampuan masyarakat dalam pengadaan dana, disisi lain upaya pendidikan memerlukan modal dasar, sekaitan dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal pemerintah bertanggungjawab dalam memobilisasi dan pengadaan dana.

Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat didefinisikan sebagai *lembaga pendidikan yang bersifat lokal yang berada di luar pendidikan sistem persekolahan, yang diperuntukan bagi masyarakat lokal yang dikoordinasikan oleh masyarakat sendiri untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan peluang belajar untuk pembangunan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup orang-orang*. PKBM memiliki peran kunci dalam upaya mengembangkan individu dan masyarakat dalam melakukan pembangunan. PKBM memiliki mekanisme yang kuat dalam memberdayakan individu dan meningkatkan pembangunan masyarakat. Semua ini dilakukan dengan memberikan peluang untuk semua anggota masyarakat untuk selalu terlihat dalam pendidikan sepanjang hayat. Kemajuan PKBM sesungguhnya hanya bersandar pada kemampuan mengembangkan manajemen strategis, dimana perlunya kejelasan visi dan misi, kemampuan meningkatkan akuntabilitas dan kemampuan memadukan potensi internal dengan eksternal dalam memecahkan permasalahan dan membuat keputusan.

PKBM dikembangkan dengan sejumlah karakteristik, antara lain: (1) disediakan untuk melakukan pembelajaran seumur hidup, (2) lokasi dalam jangkauan masyarakat sekitarnya, (3) usaha utamanya dalam rangka mengembangkan masyarakat, (4) program yang dikembangkan bersifat responsif dalam upaya memenuhi kebutuhan dan aspirasi anggota masyarakat, (5) memiliki mandat dari masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara substantif, pola pikir studi ini dikembangkan melalui proses identifikasi terhadap faktor-faktor determinatif dalam pemandirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Hal ini penting, mengingat esensi PKBM pada akhirnya terwujudnya PKBM komprehensif yang benar-benar mandiri. Selanjutnya kerangka pikir penelitian ini disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 2
Kerangka Pikir Penelitian
(Faktor-Faktor Determinatif Pemandirian PKBM)

Terdapat sejumlah variabel yang dominan mempengaruhi manajemen PKBM terutama dilihat dari kefungsiannya, yang pada hakekatnya akan berakumulasi dan berimplikasi pada implementasi atau penyelenggaraan program-program pendidikan nonformal (dengan berbagai unsur atau komponen programnya) di PKBM. Sejumlah pengaruh yang demikian kuat meliputi; kebijakan pemerintah dalam rangka otonomi pendidikan, aparat pemerintah terutama unsur pembina (subdin PLS, penilik PLS, dan TLD. Semua variabel ini turut mengukuhkan keberadaan PKBM).

Penyelenggara/pengelola program PKBM merupakan variabel lain yang tidak kalah dominan terutama secara langsung berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan program-program pendidikan nonformal di PKBM (seperti; PUD, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, life skills, dan lainnya). Sejalan dengan ini variabel intervening lain yang perlu diperhitungkan adalah daya dukung masyarakat (baik dalam bentuk kelembagaan maupun individu), serta unsur pendukung lainnya yang secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap penyelenggaraan program-program PKBM, terutama dalam menuju terwujudnya PKBM yang terintegrasi dan mandiri.

F. Metode penelitian

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sebelum dilakukan pengumpulan data ke wilayah sampel penelitian, terlebih dahulu dilakukan studi eksplorasi. Eksplorasi studi ini dilakukan melalui kajian terbatas di beberapa PKBM yang tersebar pada kabupaten/kota wilayah tertinggi jumlah PKBMnya di Propinsi Jawa Barat. sementara pengumpulan data dari studi ini menggunakan metode wawancara mendalam terhadap para stakeholders PKBM itu sendiri. Selain itu sebagai pelengkap digunakan daftar isian untuk mendapatkan data yang terkait dengan sumber dana, tenaga pengelola dan tutor serta sarana prasarana yang ada.

Selanjutnya data hasil penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis domain, yakni dengan mengklasifikasikan data yang sama pada satu kategori. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan terlebih dahulu data dan informasi yang diperoleh dari lapangan. Kemudian, data dari informasi yang kurang lebih sama dikelompokkan pada satu kategori. Atas dasar kategori-kategori tersebut, argumentasi disusun untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian ini. Selain itu analisis studi ini juga dilengkapi dengan analisis SWOT (*strength, weakness*) sebagai faktor internal dan (*opportunity and Threat*) faktor eksternal dari PKBM. Analisa dan pengolahan data dibagi kedalam tiga kategori, yaitu; 1) analisis data setiap PKBM, 2) analisis data tingkat propinsi, dan 3) analisis data nasional.

Berdasarkan hasil kajian dokumentasi (direktori PKBM) serta beberapa penelitian yang relevan, maka dari 33 propinsi yang ada di Indonesia ditetapkan lokasi penelitian pada 20 propinsi (60%). Penetapan ke-20 propinsi tersebut didasarkan atas urutan jumlah PKBM terbanyak secara nasional.

Studi ini dilakukan di sejumlah kota di Indonesia dan penentuannya ditetapkan dengan mempertimbangkan alasan-alasan akademik. Subyek studi ini adalah warga belajar, tutor (instruktur, sumber belajar), pengelola PKBM, Aparat dinas terkait (seperti; Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja), masyarakat setempat (seperti; tokoh masyarakat, kader, tokoh pemuda), perguruan tinggi, dunia usaha, perbankan/BPR, dan asosiasi perdagangan lainnya.

Pengumpulan data baik primer maupun sekunder dilakukan melalui teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara, penyebaran angket, observasi, maupun fokus group discussion (FGD).

Data utama adalah data kualitatif, diperkuat dengan data kuantitatif. Data kualitatif sebelum dideskripsikan, diolah terlebih dahulu dengan analisis faktor dominan dan analisis SWOT sesuai dengan maksud studi ini. Dari 20 propinsi yang diteliti mencakup 60 PKBM (M,B,BB), setelah melalui tahap verifikasi ternyata hanya 16 Propinsi (48 PKBM) yang layak dianalisis lebih lanjut.

G. Temuan Penelitian

1. Profil Manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

a. Faktor Internal PKBM

Dilihat dari sepuluh patokan Pendidikan Masyarakat yang terdiri dari warga belajar, sumber belajar, kelompok belajar, pamong belajar, panti belajar, program belajar, ragi belajar, dana belajar, sarana belajar, hasil belajar terdapat kecenderungan bahwa semakin maju PKBM semakin lengkap dan berkualitas dilihat dari sepuluh patokan pendidikan masyarakat. Dari seluruh patokan, patokan yang paling senjang terutama dari aspek kualitas manajerialnya. Berhasil diungkapkan di beberapa wilayah penelitian proporsi penyebaran tempat PKBM di perkotaan kecenderungannya lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan di pedesaan, akibatnya muncul kesenjangan dengan daerah pinggiran yang masyarakatnya relatif memerlukan layanan pendidikan nonformal. Dari aspek pengembangan kelembagaan dan manajemen PKBM, terjadi kesenjangan kemampuan para pengelola dalam penyelenggaraan PKBM. Kegiatan PKBM masih terbatas menyelenggarakan program kesetaraan, belum merambah bidang pendidikan masyarakat lainnya (misalnya bidang garapan umumnya hanya terbatas pada keaksaraan, kesetaraan dan PAUD), padahal diyakini oleh para peserta FGD bahwa PKBM memiliki posisi dan potensi yang strategis dalam memberikan layanan dan mengembangkan pendidikan serta keterampilan praktis bagi warga masyarakat.

Jumlah PKBM yang aktif saat ini diperkirakan lebih dari setengahnya. Dari setengah PKBM yang aktif, hanya sebagian yang secara penuh beraktivitas dalam waktu satu tahun, dengan ragam program tiga jenis kegiatan pendidikan nonformal.

b. Faktor Eksternal PKBM

Faktor Eksternal PKBM terdiri dari aspek pembinaan, jaringan kerja dan dampak pembelajaran. Dilihat dari aspek pembinaan, masih demikian kuat pembinaan dari pihak pemerintah. Sesuai dengan format otonomi daerah pembinaan dari pihak lain seperti pengusaha, perguruan tinggi, forum PKBM dan tokoh masyarakat masih sangat terbatas. Dilihat dari jaringan kerja, terdapat sebagian PKBM maju yang telah menjalin kerja sama dengan pihak lain seperti dalam penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran, sarana praktek pembelajaran dan sumber pembelajaran. Jaringan kerja sama umumnya hanya

untuk kepentingan jangka pendek, dan belum memasuki kepentingan jangka panjang, seperti halnya peningkatan produktivitas PKBM dan penyaluran lulusan. Dilihat dampak program pembelajaran lebih banyak penekanan pada aspek efisiensi internal seperti pada pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dampak dari segi produktivitas eksternal, seperti peningkatan produktivitas kerja dan pembelajaran lebih lanjut masih sangat terbatas.

2. Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Dari hasil penelitian ditemukan aspek profil PKBM terutama dari visi dan misi lebih diarahkan pada keterlaksanaan program Pendidikan Nonformal. Dari visi ini, program yang dikembangkan umumnya pada aspek Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Keaksaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini, di mana persyaratan minimal tiap PKBM memiliki tiga program pendidikan nonformal dan pemuda banyak yang tidak terpenuhi. Program lain seperti kewirausahaan, pelayanan informasi, kursus dan pelatihan dan keagamaan masih sangat terbatas. Jaringan informasi yang berkembang selama ini, umumnya hanya berlangsung dengan pemerintah, sedangkan dengan pihak media, PKBM, dunia usaha/industri dan instansi lain masih sangat terbatas. Potensi dan daya dukung pengembangan lebih banyak pada ketersediaan calon warga belajar sedangkan fasilitator, pembiayaan, ruang belajar, kemitraan dan sumber daya lain masih terbatas.

Salah satu aspek yang mendukung pengembangan PKBM yaitu peluang pembinaan tenaga kependidikan. Baik tutor maupun fasilitator, peluang yang agak sering dilakukan yaitu melalui seminar dan lokakarya, sedangkan mengikutsertakan tenaga kependidikan pada kursus, pelatihan dan pendidikan khusus berupa pendidikan lanjutan masih sangat terbatas.

a. Pengembangan Internal PKBM dalam Otonomi Daerah

Pengelolaan PKBM dalam rangka Otonomi Daerah terbagi dua bagian yaitu pengelolaan dan pengembangan manajemen. Dalam hal pengelolaan PKBM, perencanaan mengenai pihak yang terlibat-langkah dan prosedur-desain dan materi yang direncanakan umumnya masih menggunakan cara yang sangat sederhana, seperti halnya prosedur dalam identifikasi kebutuhan yang masih sering diabaikan.

Pengorganisasian PKBM umumnya masih berlangsung secara sederhana, baik seksi dan bidang yang ada dalam PKBM maupun personil yang menanganinya sering masih dirangkap atau dipegang oleh orang yang bukan kompeten pada bidangnya. Strategi yang diandalkan lebih banyak memanfaatkan sumber internal dan masih terbatas memanfaatkan sumber eksternal.

Dilihat dari pelaksanaan dan pengendalian program, dibandingkan dengan lembaga lain, PKBM seharusnya lebih fleksibel dan tidak terpaku pada pola pendidikan lembaga formal. Pengendalian selama ini hanya terpaku pada pola hubungan antara Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dengan PKBM dan belum memiliki keragaman.

Penilaian belum mencerminkan tingkat akuntabilitas baik yang menyangkut peningkatan pengetahuan dan kemampuan staf maupun peserta belajar. Pengembangan manajemen yang menyangkut penganeka-ragaman motif warga belajar, kurikulum baik yang berbasis kompetensi maupun keterampilan, strategi pembelajaran yang lebih menengahkan siswa aktif, ketenagaan yang kompeten dan berpengalaman dan pendanaan yang beragam dan sarana yang lebih meningkat dalam perkembangan beberapa tahun terakhir tidak terjadi peningkatan yang signifikan.

b. Pengembangan Eksternal PKBM dalam Otonomi Daerah

Selanjutnya, dilihat dari pengembangan eksternal dengan penekanan struktur organisasi yang ekspansif, pemanfaatan media komunikasi dan mekanisme kerja sama dari hasil penelitian tampilannya masih terbatas.

Dari hasil analisis data diperoleh pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

<p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya yang murah - Adanya kebutuhan warga belajar untuk mendapatkan layanan yang fleksibel - Dukungan sarana dan prasarana yang ada di sekitar - Erat dengan budaya lokal - Memiliki kesesuaian serta visi sesuai dengan program pemerintah - Netralitas dalam afiliasi 	<p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem manajemen yang sangat sederhana - Kompetensi tutor dan fasilitator yang rendah - Kualitas pembelajaran yang rendah - Penilaian tidak memiliki kejelasan akuntabilitas keterampilan dan dampak - Tingkat kemandirian yang rendah - Motivasi mendapatkan bantuan atau stimulasi - Lemahnya wawasan, pemahaman, penyelenggara PKBM - Bidang pembelajaran yang dikembangkan masih terbatas pada satu kegiatan (mis; PAUD), padahal berdasarkan ketentuan harus ada tiga kegiatan
<p>Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat beberapa dunia usaha dan industri yang memiliki kepedulian sosial pada PKBM - Adanya beberapa pendampingan yang dilakukan oleh pihak pendidikan tinggi dan lembaga profesi - Adanya peluang untuk mengembangkan lembaga berbas dari, oleh dan untuk masyarakat - Adanya keinginan untuk memanfaatkan fasilitas dari pihak tokoh daerah dalam bentuk pendidikan paket A dan B 	<p>Tantangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum difahami peran PKBM dalam kerangka pendidikan untuk semua dan pendidikan sepanjang hayat - <i>Bargaining position</i> yang rendah - Motivasi penyandang dana untuk memberikan dukungan rendah - Masih kurangnya dukungan politik dari pemerintah kab/kota. - Anggaran dari Pemerintah Kab/kota yang rendah - Penganggaran PKBM masih belum ada - Masih terbatasnya sosialisasi gagasan pengembangan PKBM - Kurangnya informasi bagi penyelenggara/ pengelola PKBM, terutama PKBM yang jauh dari ibukota kabupaten/kota. - Kurangnya koordinasi

Selanjutnya, pengembangan PKBM dalam kerangka Otonomi Daerah perlu merujuk mempertimbangkan kaidah lembaga pada otonomi daerah, yaitu:

- a. Pengembangan PKBM merupakan usaha beresiko tinggi yang membutuhkan manajemen strategis,
- b. Pelaksanaan PKBM dalam kerangka Otonomi daerah harus didasarkan pada permasalahan sebelumnya dilakukan perencanaan dan implementasinya
- c. Pengembangan PKBM membutuhkan komitmen dan koordinasi dari pihak pemerintahan,
- d. Harapan yang ada dari warga belajar dan masyarakat harus dikelola dengan sangat seksama untuk menghindarkan harapan yang tidak realistis,

- e. partisipasi pada PKBM dalam kerangka otonomi daerah membutuhkan pendekatan adaptif pada lingkungan lokal,
- f. Pengembangan PKBM merupakan proses belajar yang harus didasarkan pada kemampuan untuk mengambil resiko dan inovasi,
- g. Pengembangan PKBM membutuhkan kecakapan antarsektoral dan membutuhkan kapasitas substansi multidimensi,
- h. Pengembangan PKBM harus ditunjang oleh lingkungan yang kondusif,
- i. Pengembangan PKBM harus berlangsung pada jaringan pada reformasi pada bidang lainnya,
- j. Tata kelola dari otonomi daerah sangat tergantung pada keuangan lokal